

SURAT-SURAT PERJANJIAN TANAH NAGARA AGUNG KARATON NGAYOGYAKARTA TAHUN 1827-1831

(Sebuah Kajian Filologi Historis)

Rendra Agusta

Program Studi Kajian Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta
Surel: kangrendraagusta@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pembagian wilayah Mataram pasca perjanjian Giyanti masih menyisakan permasalahan yang panjang, terutama daerah-daerah di luar ibukota negara. Pasca perang Jawa tahun 1830, daerah-daerah di wilayah Yogyakarta dan Surakarta kembali ditata ulang oleh komisaris pemerintah Hindia Belanda. Pembagian itu melahirkan beberapa perjanjian-perjanjian turunan, salah satunya terkait perjanjian tanah. Penelitian adalah penelitian teks terhadap Serat Pengetan Kagungan Dalem Siti Dhusun koleksi Karaton Surakarta. Penelitian ini dilakukan karena naskah ini merupakan naskah tunggal yang menjadi landasan studi tata kraton Surakarta abad XIX. Naskah ini juga menyimpan data-data terkait ekologis pedesaan baik struktur, luas wilayah, dan beban pajak. Penelitian menggunakan metode filologis untuk menyajikan deksripsi dan edisi teks. Selanjutnya menggunakan analisis konten untuk mengungkapkan isi dari perjanjian tanah tersebut. Naskah ini memuat yang perjanjian-perjanjian hasil ratifikasi tanah oleh pemerintah Hindia Belanda terkait pengelolaan tanah kawasan nagara agung yang disepakati oleh Sultan Hamengkubuwono V di Yogyakarta dan Sunan Pakubuwono VII di Surakarta.

Kata kunci: siti dusun, perjanjian, nagara agung, ratifikasi Mataram.

LAND AGREEMENT LETTER OF NAGARA AGUNG YOGYAKARTA IN 1827-1831 (A History Philological Study)

Abstact

The agreement to divide the Mataram region after the Giyanti agreement still leaves a long problem, especially in areas outside the capital. After the Java war in 1830, areas in the Yogyakarta and Surakarta regions were reorganized by the Dutch East Indies government commissioner. The division gave birth to several derivative agreements, one of which was related to land agreements. The research was a textual study of Pengetan Kagungan Dalem Siti Dhusun from Karaton Surakarta. This research was conducted because this manuscript is a single manuscript or codex unicus which became the basis for the study of the Kraton Surakarta in 19th century. This paper also stores data related to rural ecology in terms of structure, area and tax burden. The research uses the philological method to present text descriptions and editions. Then use content analysis to reveal the contents of the land agreement. This manuscript contains the results of the land ratification of treaties Dutch government related to the management of the Nagara Agung agreed by Sultan Hamengkubuwono V in Yogyakarta and Sunan Pakubuwono VII in Surakarta.

Keywords: siti dusun, village agreement, nagara agung, ratification of Mataram.

I. PENDAHULUAN

Pembagian wilayah kerajaan-kerajaan Jawa “*Vorstenlanden*” sebagai pewaris Mataram Islam dimulai dengan adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti membagi wilayah Mataram menjadi dua yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1757, Mas Said juga ditetapkan sebagai *Pangeran Mardika* atas Kadipaten yang berstatus independen di bawah kekuasaan kraton Surakarta. Pada tahun 1813, pasca Geger Sepahi, di wilayah Kasultanan Yogyakarta juga dibentuklah Kadipaten Pakualaman. Namun, ratifikasi tanah di Yogyakarta dan Surakarta tidak berhenti pada masa itu. Intervensi kolonial dalam pembagian tanah ini makin gencar dilakukan pasca perang Jawa 1825-1830 (Carey, 2011). Kesepakatan antara keraton Surakarta dan Yogyakarta ditandai dengan Perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830. Perjanjian ini menandai akhir pemberontakan Diponegoro terhadap Sultan HB V yang dikendalikan Belanda dan merupakan konsekuensi dari Perjanjian Giyanti 1755. Perjanjian Klaten merupakan awal dari wilayah kekuasaan permanen Kasultanan Yogyakarta dan merupakan pembaharuan batas-batas wilayah baru antara Kasultanan dan Kasunanan (Ramadhan, 2015).

Arsip dan naskah yang terkait tentang peristiwa ini tersebar diberbagai penyimpanan, baik di dalam maupun luar negeri. Secara garis besar daerah pembagian wilayah pasca perjanjian Klaten ini dibuat oleh Valck dan Roufaer pada tahun 1890 berdasarkan catatan Raden Ngabehi Arya Pradata (Houbent, 2002: 122). Namun rincian detail, hanya dijelaskan pada wilayah yang memiliki peranan penting bagi kraton seperti wilayah Ibokota dan tempat-tempat suci di Sela. Penelitian ini berangkat pada naskah koleksi perpustakaan Sasana Pustaka Kraton Surakarta dengan nomor 2 Ta berjudul *Pengetan Kagungan Dalem Siti Dhusun bawah Surakarta lan Ngayogyakarta nalika Jaman PB VII* selanjutnya disebut dengan naskah SD. Secara keseluruhan naskah ini telah ditelaah secara filologis (Agusta, 2013), namun ada bagian yang belum dikaji yakni salinan surat-surat terkait penyewaan tanah di wilayah nagara agung Mataram. Penelitian surat-surat raja-raja di nusantara cukup banyak dilakukan antara lain (Pudjiastuti, 2004) mengenai surat-srat diplomasi dan perdagangan Sultan Banten, selain itu (Suryadi, 2007) juga mengungkapkan surat-surat Sultan Buton. Mujizah (2014) juga mengungkap praktek perbudakan dalam surat-surat Raja Tanette. Penelitian ini mengambil nukilan dari naskah SD terkait persewaan tanah di wilayah nagara agung keraton Yogyakarta.

Bentuk penelitian naskah Siti Dhusun ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah dan teks yang tersimpan di Perpustakaan Sasana Pustaka Kraton Surakarta dengan nomor katalog 2 Ta. Adapun data dalam penelitian ini adalah varian-varian dan isi yang terdapat pada naskah Siti Dhusun dilakukan dengan cara membuat catatan-catatan dokumen atau arsip yang diteliti untuk mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti (Sutopo, 2002: 69). Teknik tersebut dimaksudkan agar data yang berupa varian-varian dan isi pada naskah Siti Dhusun dapat ditemukan dan dikumpulkan untuk kemudian diolah dalam analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan (Sutopo, 2002: 97). Reduksi data dilakukan dengan metode penyuntingan naskah tunggal, yaitu dengan metode standar (biasa). Metode standar digunakan apabila isi naskah dianggap sebagai

cerita biasa, bukan cerita yang dianggap suci atau penting dari sudut agama maupun sejarah, sehingga tidak perlu diperlakukan secara khusus atau istimewa (Djamaris, 2002: 28). Dalam penelitian ini, sajian data meliputi sajian filologis dan isi. Sajian filologis mencakup deskripsi naskah, transliterasi, kritik teks, suntingan teks dan aparat kritik. Sajian isi menjabarkan apa yang menjadi masalah, menganalisa lebih dalam dan menafsirkan data yang ada serta mengungkapkan konten sejarah naskah Siti Dhusun. Sajian data yang berupa suntingan teks yang bersih dari kesalahan dan telaah isi yang telah dibahas, dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Setelah mendapat suntingan yang bersih dari kesalahan, teks dianalisis dengan kajian historis. Simpulan akhir merupakan jawaban atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah ialah uraian ringkasan naskah secara terperinci. Deskripsi naskah penting untuk mengetahui kondisi naskah dan sejauh mana isi mengenai naskah yang diteliti. Emuch Herman Soemantri menguraikan bahwa deskripsi naskah merupakan sarana untuk memberikan informasi atau data mengenai: judul naskah; nomor naskah; tempat penyimpanan naskah; asal naskah; keadaan naskah; ukuran naskah; tebal naskah; jumlah baris setiap halaman; huruf, aksara, tulisan; cara penulisan; bahan naskah; bahasa naskah; bentuk teks; umur naskah; pengarang atau penyalin, asal-usul naskah yang tersimpan di masyarakat; fungsi sosial naskah; serta ikhtisar teks atau cerita (Soemantri, 1986: 2). Judul naskah *Pengetan Kagungan Dalem Siti Dhusun Karaton Surakarta saha Ngayogyakarta* (selanjutnya disebut dengan naskah SD) tertulis pada halaman pertama naskah. Naskah tersebut hanya terdapat dalam dengan nomor katalog 2 Ta / KS 172 / SMP 112/3; R165/12 (Florida, 1993: 123) (Girardet, 1983: 134). Naskah tulis tangan ini tersimpan di bagian koleksi naskah Perpustakaan Sasana Pustaka Keraton Surakarta. Naskah-naskah yang memuat tentang *siti* sezaman dengan naskah antara lain *Pratelan Kagungan Siti Dhusun* nomor HU.7 koleksi FSUI (T. E. Behrend, 1990: 434) dan *Catetan Warni-warni* nomor W.251b koleksi Perpustakaan Widyabudaya Yogyakarta (Lindsay, Soetanto, Feinstein, & Behrend, 1994: 174). Namun, kedua naskah yang lain berbeda sekali dengan naskah SD, maka naskah ini merupakan naskah tunggal. Keadaan naskah SD cukup bagus. Kertasnya masih utuh, jilidan naskah cukup rapi, tetapi pada bagian sampul terdapat bagian yang berlubang. Pada halaman awal juga terdapat kertas yang berlubang, tetapi hal itu tidak merusak teks karena hal itu terjadi pada halaman kosong. Beberapa hal tersebut mengindikasikan bahwa naskah tersebut dirawat dengan baik. Naskah SD koleksi Perpustakaan Sasana Pustaka Karaton Surakarta memuat teks prosa atau *gancaran*. Ukuran sampul naskah 43 cm x 27,5 cm, ukuran naskah 42,5 cm x 27 cm dengan tebal 4,5 cm sedangkan ukuran teks 42,5 cm x 27 cm. Naskah ini terdiri dari 350 halaman (331 halaman isi dan 19 halaman kosong). Jumlah baris pada setiap halaman naskah rata-rata 25 baris, 1 baris terdiri atas 18-32 huruf. Jenis atau macam tulisan yaitu aksara Jawa *carik* atau *dentawijanjana*, ada beberapa huruf latin seperti A, B, C, D, E, dan F. Ukuran huruf atau aksara sedang, dengan bentuk huruf tegak dan *kubistis* atau *bata sarimbag*, sedikit condong (miring) ke kanan. Jarak antarhuruf sedang, jarak antarbaris agak renggang. Warna tinta yang digunakan berwarna hitam. Lembaran naskah yang dipakai untuk tulisan adalah halaman muka dan belakang, yaitu dengan ditulis bolak-

balik (*recto verso*). Bekas pena yang tembus ke halaman berikutnya tidak dijumpai dalam naskah ini. Bahan yang digunakan dalam naskah *SD* adalah kertas Eropa, kualitas bagus, warna kertas kecoklat-coklatan dan terdapat *watermark*. Teks naskah *SD* berbentuk prosa atau *gancaran*. Isi dari naskah *SD* yaitu 4 surat perjanjian sewa-menyewa tanah dan 26 data wilayah keraton Surakarta. Isi dari naskah *SD* yaitu 4 salinan surat perjanjian sewa-menyewa tanah dan 26 data wilayah keraton Surakarta. Ada enam buah keterangan waktu yang memperjelas bahwa naskah ditulis bertahap. Keterangan tersebut ditemukan pada halaman 8 pada naskah *SD*, yaitu tertulis *Katulis Ngayogyakarta, Akad tanggal kaping 26 sasi Sura taun Je 1748*¹. Keterangan lain ditulis pada halaman 6, 9, 13, dan 19 yaitu *Dhawuhing pangandika ing Surakarta Hadiningrat ping 24 Juni 1831*². Berdasarkan keterangan di atas, maka disimpulkan bahwa naskah tersebut ditulis antara tahun 1820-1831. Oleh karena itu, umur naskah tersebut sekitar 199 tahun. Pada penelitian ini difokuskan pada 4 surat persewaan tanah persewaan tanah pada halaman satu sampai sembilanbelas.

B. Kritik Teks, Suntingan Teks, dan Aparat Kritik

Naskah *SD* adalah naskah yang ditulis dengan aksara Jawa *carik*, sehingga transliterasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka penyuntingan teks. Setelah transliterasi dilakukan, yang selanjutnya dilakukan adalah kritik teks. Kritik teks menurut Edwar Djamaris (2002: 8) adalah pengkajian, pertimbangan, perbandingan, dan penentuan teks yang asli atau teks yang otoritatif, serta pembetulan, perbaikan, pembersihan teks dari segala macam kesalahan.

Penyuntingan teks dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan pedoman ejaan yang berlaku, penggunaan huruf kapital, tanda-tanda baca, penyusunan alinea, dan bagian-bagian cerita (Djamaris, 2002: 9). Dalam penelitian ini, pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam suntingan teks adalah *Kamus Bausastra Djawa* dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan. Aparat kritik (*apparatus criticus*) merupakan suatu pertanggungjawaban perbaikan bacaan dalam penelitian naskah yang menyertai suntingan teks dan merupakan kelengkapan kritik teks (Djamaris, 2002: 9). Dalam aparat kritik juga ditampilkan kelainan bacaan yang merupakan kata-kata atau bacaan salah di dalam naskah. Berikut ini adalah beberapa contoh varian yang ditemukan dalam naskah *SD* yang disertai keterangan gambar, kritik teks, suntingan teks, dan aparat kritik:

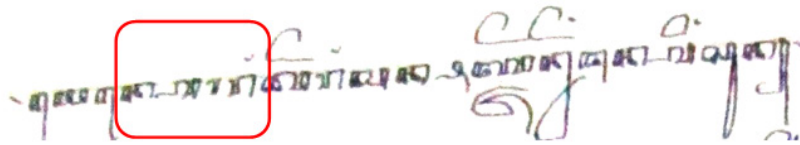
1. Lakuna



Gambar 1. Naskah *SD* halaman 148 baris 3. Tertulis *Panè Ngabèi Sindupraja* dalam nama tersebut terdapat lakuna suku kata pada kata *panè* seharusnya ditulis *panèwu*.

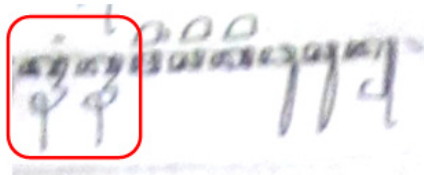
1 Terjemahan: Ditulis di Yogyakarta, Minggu 26 Sura 1748 Je jika dikonversi menjadi 5 November 1820.
2 Terjemahan: Ketetapan di Surakarta Hadiningrat tanggal 24 Juni 1831.

2. Adisi



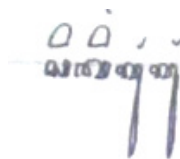
Gambar 2. Naskah SD, hal. 11 baris 1. Terdapat adisi huruf yaitu pada kata “yèn **orang** têng lan Panjênênganingsun³”. Sandhangancêcak pada kata “orang” seharusnya tidak ada, sehingga menjadi “ora”.

3. Hiperkorek

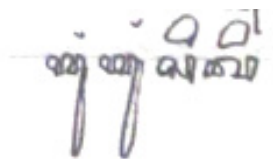


Gambar 3. Naskah SD, hal. 17 baris 7. Tertulis “trêngtrêming siti dhusun” seharusnya ditulis têngtrêming siti dhusun⁴

4. Transposisi



Gambar 4. Naskah SD hal. 24 baris 9, *siti gunggung* (terjemahan: tanah berjumlah).



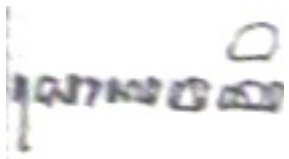
Gambar 5. Naskah SD hal. 242 baris 17, *gunggung siti* (terjemahan: jumlah tanah). Pada gambar 10 dan 11 terlihat jelas terjadi transposisi.

3 Terjemahan: apabila tidak sesuai dengan perintahku.

4 Terjemahan: tentramnya tanah dan desa.

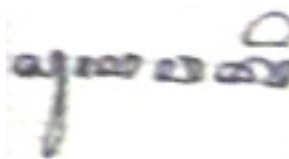
5. Ketidakkonsistenan

Penulisan *Sokawati*, *Sukawati* dan *Sukawangti*.



Gambar 6.

Naskah SD, penulisan *Sokawati* halaman 59 baris 14.



Gambar 7.

Naskah SD, Penulisan *Sukawati* halaman 59 baris 16.



Gambar 8.

Naskah SD, Penulisan *Sokawangti* halaman 138 baris 5.

Dalam hal penyajian suntingan, ada dua alternatif yang bisa dilakukan. Pertama, apabila penyunting merasa bahwa ada kesalahan dalam teks tersebut, ia dapat memberikan tanda yang mengacu pada aparat kritik; di sini ia menyarankan bacaan yang lebih baik. Kedua, pada tempat-tempat yang terdapat kesalahan, penyunting dapat memasukkan koreksi ke dalam teks tersebut dengan tanda yang jelas yang mengacu pada aparat kritik; di sini bacaan asli akan didaftar dan ditandai. Dalam kedua metode tersebut, penyunting harus menyatakan dan mempertanggungjawabkan segala jenis perubahan yang dibuat agar bisa ditelusuri kembali bacaan aslinya tanpa kesulitan yang berarti (Robson, 1994: 25). Agar pembacaan dan pemahaman suntingan teks naskah SD dapat dipahami di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka dalam penyajian suntingan teks ini digunakan tanda-tanda sebagai berikut.

Angka Arab dengan tanda [1], [2] dan seterusnya menunjukkan pergantian halaman. Angka Arab ukuran kecil di atas ^{1, 2, 3, dst} menunjukkan nomor catatan atau kritik teks pada kata yang terdapat kesalahan. Usulan kata yang dianggap benar untuk kata yang dianggap salah, ditulis pada catatan kaki. Jika terdapat kesalahan yang sama lebih dari satu kata, maka nomor kritik teks hanya ditulis satu kali pada kata yang pertama ditemukan. Selanjutnya, usulan kata yang dianggap benar dari kesalahan kata yang sama akan mengikuti kritik teks pada kata yang pertama tersebut. Misalnya, ditemukan kata *sumbêr* lebih dari satu, maka kata yang dikritisi hanya pada kata *sumbrê* yang pertama ditemukan dan pada bagian usulan akan ditulis “*sumbêr** dan di tempat yang lain”. Hal

tersebut menunjukkan bahwa kata *sumber* dikritisi dengan kata *sumber* berdasarkan pertimbangan linguistik dan kata *sumber* yang ditemukan kemudian, kritik teksnya mengikuti usulan tersebut. Keterangan mengenai ilustrasi ditulis di bagian bawahgambar.

Adapun beberapa tanda yang dipakai antara lain tanda ^ di atas vokal e(ê) dibaca seperti dalam bahasa Indonesia pada huruf e dalam kata “rentan, sekarang”. Tanda ` di atas vokal e(è) dibacaseperti dalam bahasa Indonesia kata “ember, sukses”. Huruf vokal e dibaca seperti “e” dalam bahasa Indonesia pada kata “enak”. Tanda # menunjukkan bahwa kata tersebut dibetulkan berdasarkan pertimbangan kontekstual. Tanda * menunjukkan bahwa kata tersebut dibetulkan berdasarkan pertimbangan linguistik.

Sastra laku ditransliterasikan dengan tidak mengulang konsonan penutup pada kata berikutnya. Misalnya: *ing Ngampèl* ditransliterasikan *ing Ampèl*. Penulisankata ulang (*dwilingga*) dalam dalam teks, akan ditransliterasikan dengan menggunakan tanda hubung (-), misalnya *dandan* akan ditransliterasikan dengan *dandan-dandan*. Penulisan kata reduplikasi awal sebagian (*dwipurwa*), ditulis menurut pelafalannya, misalnya *gagaduhanipun* ditransliterasikan *gêgaduhanipun*. Penulisan kata dasar yang berakhiran huruf /h/ dan mendapat akhiran /-e/, /-a/, /-an/, /-ane/, /-anira/ dalam penulisan aksara Jawa sering ditulis dengan fonem /y/, tetapi dalam suntingan teks fonem akan ditranslierasikan dengan huruf /h/, misalnya *kaliyan* ditransliterasikan *kalihan*. Penulisan awalan (prefiks) *dipun* diberi tanda hubung (-) jika bertemu dengan konsonan /g/ dan /y/ untuk memperjelas kata dan menghindari timbulnya kesalahpahaman dalam pembacaan suntingan teks. Misalnya, *dipungalih* ditransliterasikan *dipun-galih*. Penulisan kata *kônca*, *môngka*, *môngsa*, dan *bôngsa*, yakni vokal ô dengan *taling tarung* ditransliterasikan secara konsisten dengan *kanca*, *mangka*, *mangsa*, dan *bangsa*. Awalan /a/ pada *amajêgi*, *angglyêrna*, *anjawi* dsb bukan merupakan kesalahan penulis, melainkan merupakan gaya penulis, karena kata tersebut konsisten dari halaman awal sampai terakhir pada naskah, yang maksudnya adalah *majêgi*, *ngglyêrna*, *kajawi* dll. Akhiran /êna/ pada *angaturêna*, *angethêrna*, *amangsulêna* dsb bukan merupakan kesalahan penulis, melainkan merupakan gaya penulis, karena kata tersebut konsisten dari awal sampai terakhir pada naskah, yang dimaksud *ngaturna*, *ngethêrna*, *mangsulna* dll. Akhiran/ing/ pada kata *wondening*, *bakdaning*, *sarèhning* dsb bukan merupakan kesalahan penulis, melainkan merupakan gaya penulis, karena kata tersebut konsisten dari awal sampai terakhir pada naskah, secara linguistik yang dimaksud *wondene*, *bakdane*, *sarèhne* dll. Pembetulan berdasarkan linguistik maupun kontekstual pada kata yang sejenis maka akan dicetak huruf dicetak miring pada halaman berikutnya. Misal lakuna suku kata pada *gugung*, atas dasar pembetulan linguistik diganti menjadi *gunggung*. Apabila di halaman berikutnya terdapat kata *gugung* tidak diberi catatan kaki, hanya dicetak miring *gunggung* yang berarti *idiom* dengan sebelumnya. Penulisan nama kota atau sinonimnya dipertahankan sesuai ragam yang ada misalkan kata *Jatinom*, *Jatinèm* dan *Tinom*. Pada kata tersebut tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan karena merupakan gaya penulis. Tanda /“/ di dalam naskah berarti *idiom* dengan atasnya. Seperti halaman 337 tanda /“/ menunjukkan sama dengan di atasnya. Suntingan teks pada tulisan ini dapat dilihat di lampiran.



Gambar 9. Naskah SD hal. 337 baris 10

Tanda (“) digunakan untuk menunjuk idem atau sama dengan kata *saringgit kalih wang*.

C. Kajian isi

Dalam khasanah sastra nusantara terdapat teks yang memang dimaksudkan sebagai hukum dalam masyarakat atau hukum adat. Di Jawa dikenal dengan *anggêr-anggêr* atau undang-undang (Baried, 1994: 29). Selain itu kita juga mengenal adanya *Pêngêtan*, *Pratelan*, *Prangjanjèn*, *Rêrêpèn*, dan lain-lainnya. Naskah dengan jenis – jenis ini adalah karya prosa non-sastra. Dari 350 halaman pada naskah SD, terdapat 20 halaman yang memuat tentang salinan perjanjian sewatanah yang memuat tentang perubahan-perubahan konsesi dan proses ratifikasi tanah di wilayah Yogyakarta-Surakarta.

Perjanjian Giyanti memuat wilayah Kesultanan Yogyakarta pada mulanya dibagi menjadi beberapa lapisan yaitu Nagari Ngayogyakarta (Ibukota), *Nagaraagung* (wilayah utama atau pendamping), dan *Mancanagara* (wilayah luar). Wilayah ibukota dan *nagaraagung* seluas 53.000 karya dan *Mancanagara* seluas 33.950 karya. Selain itu, masih terdapat tambahan wilayah dari Danurejo I di Banyumas, seluas 1.600 karya (sekitar 9,3544 km persegi). Data-data mengenai perpindahan kekuasaan sejak perjanjian Giyanti 1755 hingga perjanjian Klaten 1830 bukanlah hal yang mudah. Pada tahun 1773, daftar registrasi tanah dalam *Serat Klepu* diganti dengan *Serat Ebuk Anyar*. Kedua ini merupakan kompilasi wilayah Yogyakarta-Surakarta, hingga saat ini keberadaan kedua naskah ini dipertanyakan. Pada tahun 1792 dan 1802, Sultan Hamengkubuwono II membagi wilayahnya kembali untuk meningkatkan pendapatan keraton. Setelah itu, wilayah Yogyakarta-Surakarta yang belum jelas batasnya juga makin rumit ketika penambahan wilayah Pakualaman dan Mangkunegaran. Pada tahun 1812, Raffles membuat perjanjian penataan ulang tanah-tanah kerajaan yang lebih teratur (Rcklefs, 2002: 114). Perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830 merupakan penataan akhir wilayah keraton Yogyakarta maupun Surakarta yang lebih permanen. Pembagian tanah yang ditukarkan antara Yogyakarta dan Surakarta dibuat daftarnya oleh patih Danureja di Yogyakarta pada tahun 1830 (Houbent, 2002: hal. 118), berikut tabel redistribusi tanah tersebut.

Tabel 1. Redistribusi Tanah Pasca Perjanjian Klaten 1830

Tanah-tanah yang diberikan Surakarta kepada Yogyakarta	Karya	Tanah-tanah yang diberikan Yogyakarta kepada Surakarta	karya
Mataram dan Kulon Progo	9.818	Pajang	15.094
Gunung Kidul	471	Sokawati	2.172
Mataram Utara, Krasak	500	Matesih	329
Sokawati Utara, Sela	50	Sela dan Serang	450
		Gunung Kendeng	177
		Traskaras	700
		Gunung Kidul	189
		Mataram, Imogiri dan Kotagedhe	500
		Tanah <i>Pancasan</i>	2. 646
Total	10.839	Total	22.257

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan tabel di atas, ratifikasi tanah membuat Yogyakarta kehilangan banyak wilayah di *Nagara Agung* dan *Mancanegara*. Pada naskah SD, terdapat nukilan mengenai pengelolaan wilayah Yogyakarta di Nagara Agung Siti Mlaya Kusuma atau Bumi Gede. Nagara Agung ini membentang dari gunung Ungaran sampai dengan Kedung Jati. Dalam naskah SD terdapat sembilan belas halaman surat yang memuat peralihan kekuasaan atas tanah di Bumi Gede. Secara admistratif wilayah ini berada di kawasan Kadipaten Ampel⁵ dan Kadipaten Serang⁶. Salinan surat-surat tersebut memuat 1 perjanjian patih Danureja dengan Dezentje, 2 perjanjian dari Sultan Hamengku Buwono II dengan Dezentje, dan 1 surat perjanjian Sultan Hamengkubuwono V dengan Gillian Maclaine dan *Wiliyan Kusni*. Keempat surat perjanjian tersebut memuat tentang penyewaan tanah kepada para pengusaha Eropa. Adapun beberapa nama yang disebut adalah Johannes Agustinus Dezentje, Maclaine, dan *Wiliyan Kusni*.

Johannes Agustinus Dezentje atau biasa disebut sebagai Tinus Dezentje (1797-1839) adalah putra dari seorang pegawai berkebangsaan Eropa untuk raja dari Kasunanan Surakarta bernama August Jan Caspar (1765-1826). Tahun 1816 dari gajinya sebagai perwira, Caspar menyewa tanah apanage milik Kasunanan yang terbentang dari Salatiga, Ampel sampai Boyolali. Tanah ini selanjutnya diwariskan kepada Tinus, yang kemudian merintis usaha perkebunan keluarga Dezentje di Vorstenlanden (Ulbe Bosma, 2007:76). Saat Perang Jawa (1825-1830) berlangsung, kondisi ini mengancam bisnis perkebunan miliknya. Untuk menjamin keamanan bisnisnya, Tinus Dezentje rela mengeluarkan biaya untuk mempekerjakan 1.500 serdadu. Detasemen ini merupakan *hulptroepen* atau pasukan pembantu militer Belanda. Atas permintaan Jenderal De Kock, Dezentje mempengaruhi Sri Susuhunan untuk tetap bersikap netral dalam Perang Jawa. Untuk jasanya ini, kerajaan Belanda memberikan penghargaan berupa *Orde de Nederlandse Leeuw* kepada Tinus (Weitzel, 1852: 115). Tinus meninggal pada 7 November 1839 dalam usia 42 tahun. Ia mewariskan lahan perkebunan seluas 1.275 Hektar. Sedangkan Gillian Maclaine adalah seorang pebisnis dan petualang yang berasal dari Skotlandia. Ia mendirikan perusahaan bernama Gillian-Watson.

5 Saat ini berada di wilayah Boyolali dan Kabupaten Semarang.

6 Saat ini ditenggelamkan di waduk Kedung Ombo Sragen pada tahun 1985.

Maclaine datang mendarat di Batavia pada tahun 1820 sebagai agen dari Firma MacLachlan dari Inggris. Sesudah mendarat, Maclaine dan beberapa pengusaha Britania lainnya menyewa tanah di *Vorstenlanden*, membeli satu perkebunan di Buitenzorg, dan menyewa lahan di Malangbong yang ditanaminya kopi. Dia juga bertindak sebagai agen bagi pengusaha kopi lainnya, di antaranya keluarga Dezentje yang sangat berpengaruh di daerah Surakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1822 dia mendirikan firmanya sendiri yakni Maclaine & Co. di Batavia. Bagaimapapun, tidak semua hal berjalan mulus baginya. Pecahnya Perang Diponegoro di tahun 1825 menghancurkan usahanya baik di *Vorstenlanden* maupun di Malangbong. Pada tahun 1827 melalui temannya yakni Edward Watson, dia menerima tawaran saudagar kaya raya Britania di Calcutta di India John Palmer untuk menjadi agennya di Hindia, dia kemudian mengubah firmanya menjadi Maclaine Watson & Co. di tahun tersebut yang menandakan bergabungnya Watson sebagai partner dalam firma. Pada tahun 1830, resmi dia tidak memiliki tanah di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, sekaligus mengakhiri hubungan bisnisnya dengan keluarga Dezentje (Knight, 2015: 141). Sedangkan *Wiliyan Kusni* sampai tulisan ini dibuat, belum teridentifikasi siapa dan apa peranannya dalam penyewaan tanah di Yogyakarta dan Surakarta. Beberapa pengusaha tersebut wajib mentaati kebijakan kraton yang tentunya juga bersumber pada Angger-angger Jawi (Roorda, 2002: 223). Hal ini terkait pembayaran pajak, sumbangan saat *Grebeg*, dan kebijakan etik lain terkait kehidupan masyarakat di pedesaan dan pegunungan.

1. Surat Patih Danureja III kepada Dezentje

Surat piagam Kanjeng Raden Adipati Danureja⁷ yang dipinjamkan kepada tuan Johannes Agustinus Dezentje di Ampel. Pada intinya tuan Johannes Agustinus Dezentje diberi wewenang melalui surat piagam dan membayar pajak tanah dan desa kepunyaan kerajaan, berikut ini nama-nama desanya: Di Penthongan 1 *jung*⁸, Banaran 1 *jung*, Wanasegara 1 *jung se-kikil*⁹ jadi jumlahnya 4 ½ *jung*, tanah tersebut terletak di sebelah timur gunung Merbabu. Lama pembayaran pajak 8 tahun menjadi 16 angsuran mulai *garêbêg* Mulud Je 1758 hingga jatuh tempo pada *garêbêg* Pasa tahun 1765 menanggung 70 reyal, 1 reyal 30 *uang* dalam setahun. Jumlah pajak 4 ½ *jung* tadi, tiap setengah tahun menyerahkan 122 ½ reyal diserahkan dua kali dalam setahun. Lalu Danureja juga sudah menerima uang tunai sebesar 180 reyal berlaku selama 4 tahun. Danureja berjanji kepada tuan Dezentje saat penyerahan pajak tengahtahunan, ia menambahkan seperempat dari jumlah pajak setahun dan bersedia menerima 61 ¼ reyal saat penyerahan. Sedangkan sahnya uang tunai pajak 400 tadi sampai habis perjanjian dalam 8 tahun tidak dikenai pajak lainnya. Lalu tuan Dezentje juga diberi wewenang atas *bumi mutihan* di Pantaran *se-jung* tadi. Dalam surat piagam ini juga dijelaskan bahwa Tuan Dezentje tidak diperkenankan bertindak di luar kewajibannya yakni membersihkan pemakaman dan membenahi yang rusak hingga baik. Saat *garêbêg* Mulud, para *bêkêl* wajib ke keraton untuk menyerahkan hasil bumi *mutihan*. Lalu tuan Dezentje juga tidak diperkenankan merusak desa, menganiaya orang desa atau menggelapkan pajak, mendatangkan orang jahat dan jangan bersekutu dengan orang yang berbuat jahat dan lain sebagainya. Sebaliknya

7 Berdasarkan pertimbangan tahun masa berkuasa, penulis berasumsi bahwa Danureja yang dimaksud adalah Kanjeng Raden Adipati Danureja III yang menjadi patih pada 1812-1847. Bandingkan dengan informasi pada daring <https://www.kratonjogja.id/ragam/8/pepatih-dalem-kesultanan-yogyakarta>.

8 1 *jung* senilai dengan ± 28.386 m² (Poerwadarminta, 1935, hal. 96)

9 1 *kikil* senilai dengan setengah *jung* ± 14.193 m² (Poerwadarminta, 1935, hal. 223)

tuan Dezentje wajib menjaga kesejahteraan penduduk. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa penduduk setempat baik warga maupun *békél* yang termasuk dalam wilayah 40 *jung* se-*kikil* tadi, semua patuh kepada perintah tuan Dezentje. Surat ini ditulis di Yogyakarta, Minggu 26 Sura 1748. Pada akhir surat ada tembusan kepada tuan Residen berkaitan dengan *siti pamêthakan*¹⁰ di Pantaran 1 *jung*. Intinya tanah itu tidak dimasukkan ke dalam wewenang tuan Dezentje, sebab akan menjadi pinjaman Mas Pengulu.

2. Surat Sultan Hamengku Buwono II kepada Gillian Maclaine

Pada naskah SD halaman 10-11 memuat Surat Piagam Sultan Hamengku Buwono II di Yogyakarta Hadiningrat yang diberikan kepada tuan Gillian Maclaine. Isi dari surat tersebut menyatakan bahwa Gillian Maclaine dipinjam tanah di Dhadhakan 1 *jung*, Banaran 1 *jung*, Sembung 1 *jung*, Sampet 1 *jung* jumlah 4 *jung*. Tanah tersebut berada di sebelah gunung Merbabu yang pembayarannya sudah sesuai dengan *gouvernement* Netherland. Lama pembayaran pajak selama 13 tahun menjadi 26 angsuran dimulai dari 1 Februari 1827 jatuh temponya pada tanggal 31 Januari 1840, dibebani pajak sebesar 1.000 rupiah dan dalam setahun ada pajak pertengahan tahun. Saat *garêbêg* Pasa, Maclaine harus menyerahkan 500 rupiah dan saat *garêbêg* Mulud juga 500 rupiah. Pajak tersebut diluar pajak yang lain.

Dalam surat ini memuat sanksi apabila Maclaine merusak desa, menganiaya penduduknya atau tidak membayar pajak, maka sanksi yang didapat adalah pencabutan hak sewa tanah. Lalu tuan Maclaine juga wajib mengembalikan sawah *irêngan*¹¹ saat jatuh tempo. Apabila ada tanaman yang belum tua seperti kopi, padi, dan lain sebagainya yang belum dipanen atau masih menguning, masih mendapat kelonggaran sampai selesai masa panen. Lalu tuan Maclaine juga tidak berhak memecat atau menggantung kedudukan *Dêmang*, *Békél* dan lain sebagainya, atau melantiknya tanpa sepengetahuan Sultan Hamengku Buwono II.

Pada bagian akhir surat juga terdapat perintah kepada tuan Maclaine agar jangan sampai kedatangan atau bersekutu dengan penjahat, terlebih berbuat jahat dan mendirikan persekutuan penjahat. Sebaliknya Maclaine wajib mengupayakan kemakmuran dan ketentraman desa tersebut.

3. Surat Sultan Hamengku Buwono II kepada Dezentje

Pada naskah SD halaman 14-18 ini terdapat surat perjanjian Sultan Hamengku Buwono II yang bertahta di Keraton Yogyakarta dengan Johannes Agustinus Dezentje di Surakarta. Surat perjanjian tersebut memuat 11 bab perjanjian. Pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Sultan Hamengku Buwono II meminjamkan tanah dan desa di Gagatan untuk sementara waktu. Sedangkan nama desa yang dipinjam lainnya antara lain: Karanggede, Kalimas Kulon, Seling Kidul, Pawing Wetan, Pawing Kulon, Pawing Wetan, Kumusu, Ragum, Kedung Pring, Pasarean, Tari, Karangasem, Balimbingan, semua berjumlah 12 *jung*. Di Kebonan, Seling Lor, Sendang, Jatisari, Ngijo, Lembadhatan, Kemusu, Kedung Lo, Krutukan, Karang Geneng, Kalongan, Duwaran, Kutukan Kayeng semua berjumlah 17 *jung*. Di Pulutan, Gedangan, Kemlaka Kerep, Pring Apus semua 4 *jung*. Di Toyan, Karang Jati, Gagatan Kulon, Gagatan Etan, semua 8 *jung*.

10 Tanah *mutihan* atau *pamethakan* adalah tanah bebas pajak yang peruntukan untuk abdi dalem yang mengurus bidang keagamaan.

11 Tanah *irêngan* adalah tanah perkebunan yang dikenai pajak oleh Kraton atau *Pabean Dalem*.

Di Talepat, Ngawèn, Karang Plasa, Karang Toya, Pidikan semua 4 *jung*. Di Tawang Sari, Ngimbat, Balumbang Kendel, Gligang, Karanglo, Kalangan, Sange Kaponan, Karanglo Pancas, Jamen Pancas, Tawang Sari semua 13 *jung*. Di kaworan, Banger, Bali Kidul, Kemusu, Bala Lor semua 6 *jung*. Jumlah semua 64 *jung* lahan persawahan tidak termasuk ladang dan hutan.

Lalu dijelaskan bahwa tuan Dezentje wajib membayar pajak tanah dan desa yang sudah disebut di depan tadi. Waktu pembayaran pajak selama 15 tahun dimulai 1 September 1827 dan jatuh temponya pada bulan Agustus 1842. Pembayaran pajak seperti di bawah ini penjelasannya. Bersama dimulainya pembayaran pajak dalam 5 tahun sebesar 1.000 ringgit. Tiap tahunnya ada pajak tengahtahunan saat *garêbêgSiyam* 1.500 ringgit, saat *garêbêg* Mulud 1.500 ringgit. Setiap 5 tahun juga menanggung pajak 3.000 ringgit. Berkat kemurahan pemerintah, maka selama pembayaran dari awal hingga akhir nanti hanya membayar sebesar 2.000 ringgit. Dalam setahun membayar 2.400 ringgit. Terakhir pajak limatahunannya membayar 3.000 ringgit. Di dalam setahun akan membayar 3.600 ringgit. Tuan Dezentje juga wajib menyetujui isi surat yang sudah diberikan, juga memberi uang tunai sebesar 1000 ringgit kepada Sultan yang mengetahui penerimaan pajak yang terakhir. Selain masalah pajak, ada kesepakatan lain yang harus dipatuhi tuan Dezentje yakni tidak akan melakukan tindakan semaunya sendiri, walaupun kepada rakyat jelata di lahan dan desa tersebut. Tuan Dezentje juga wajib membayar upah pekerja. Apabila tuan Dezentje tidak menepati perjanjian, membuat kerusakan tanah dan desa atau menggelapkan uang pajak, walaupun sudah mengakui kesalahannya, maka Sultan mencabut hak atas tanah tersebut. Tuan Dezentje juga wajib mengembangkan tanaman Padi agar jangan sampai kekurangan beras. Selain itu tuan Dezentje berwenang menanam tumbuhan lain yang dianggap perlu.

Tuan Dezentje menerima desa dan tanah *irengan*, apabila sudah jatuh tempo maka wajib mengembalikannya kepada Sultan. Tetapi apabila saat jatuh tempo masih terdapat tanaman *palawija* seperti padi, jagung, ketela pohon, serta semua yang sejenis, hasilnya di bagi dua, setengah untuk Sultan, setengah lagi untuk tuan Dezentje. Apabila ada tanaman selain *palawija* yang membutuhkan lebih dari setahun seperti Kopi, Tebu serta tanaman yang sejenis, maka tuan Dezentje tidak berhak memilikinya, hasil panen tetap menjadi milik Sultan. Tuan Dezentje tidak dikenai pajak tambahan lainnya kecuali pekerjaan memperbaiki jembatan, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tugas Negara yang diemban tetap ditanggungnya. Berkaitan dengan ketenteraman warga desa, tuan Dezentje wajib menjaga keamanan dari tindakan jahat, perjudian, bersekutu dengan penjahat dan lain sebagainya. Sultan juga akan membantu Dezentje menjaga ketenteraman dan kemakmuran desa. Tuan Dezentje juga berjanji tidak akan membuat pemberontakan di desa yang dipajaki tersebut, memecat atau mengganti kepala desa, serta berjanji tidak akan mengambil atau memakai nama seperti nama orang Jawa atau memberi nama kepada orang lain. Apabila ada kepala desa yang kurang baik tindakannya atau membuat kesalahan, tuan Dezentje hanya berwenang menggantung jabatannya. Lalu segera memberitahukannya kepada Kanjeng Raden Adipati supaya diperiksa perkaranya, karena ia yang berwenang menyelesaikan atau menghukum kepada orang yang bersalah tadi. Ada lagi, yang berwenang mengatur penggantian kepala desa adalah Kanjeng Raden Adipati. Surat ini ditulis tanggal 16 Agustus 1827. Pada bagian akhir terdapat perintah Residen terkait hutan Jati yang berada di Gagatan, intinya apabila diambil untuk membuat rumah Loji, jembatan, dan lain sebagainya, kayu tersebut bebas pajak.

4. Surat Sultan Hamengku Buwono V kepada Wiliyan Kusni

Dalam naskah SD halaman 20-21 memuat surat Sultan Hamengku Buwono V di Yogyakarta yang diberikan kepada tuan Wiliyan Kusni. Intinya, tuan Wiliyan Kusni wajib membayar pajak tanah desa di Sima sebesar 26 *jung*, serta pembayarannya sudah sesuai dengan keputusan tuan Gubernur Netherland. Pembayaran selama 18 tahun menjadi 36 angsuran. Mulai tanggal 1 Januari 1829 jatuh tempo pada 31 Desember 1846, jumlahnya sebesar 624 rupiah setahun. Saat *garêbêg* Pasa 312 rupiah, saat pasa Mulud 312 rupiah. Hal itu sudah tidak mendapat pajak tambahan lainnya atau sembarang yang keluar dari lahan itu. Tetapi Kusni masih dikenai tugas membersihkan jembatan, jalan, jalan setapak dan lain sebagainya. Kusni wajib mengembalikan tanah Tanah dan desa yang *irêngan*. Jika sudah jatuh tempo tetapi masih ada tanamannya, maka hasil panennya menjadi milik tuan Kusni dan tanah dikembalikan kepada Sultan. Apabila ada pohon *Kahwa*¹² atau pohon lainnya yang masih ada buahnya, maka buahnya menjadi milik tuan Kusni dan pohonnya tetap menjadi milik Sultan, tidak diperkenankan tuan Kusni mengambil pohon yang sudah diunduh. Tuan Kusni juga tidak boleh menganiaya rakyat jelata. Apabila meminta pekerja dari rakyat, Kusni juga wajib membayar sampai genap dan sesuai kesepakatan dengan orang desa tersebut. Kusni tidak diperkenankan membuat rusak masyarakat dan desa atau tidak memberaskan pajak. Jika Kusni melanggarnya walaupun belum selesai dalam 18 tahun, pasti tanah dan desa di Sima akan diambil kembali oleh Sultan. Tuan Kusni juga wajib menjaga tanah dan desa miliknya di Sima, jangan membuat kerusuhan dalam desa tadi, jangan sampai ada perjudian, jangan sampai ada orang bertindak jahat atau membuat kerusuhan. Apalagi menolong orang yang bertindak jahat atau masyarakat desa jangan sampai berani menjadi tempat menginap orang jahat. Ada lagi, jika ada kendala dalam memberantas kejahatan, upayakan kesejahteraan. Tuan Kusni jangan sampai memakai kuasa pemerintah yang ada di sana atau memecat kepala desa apalagi memakai jabatan seperti rakyatku bangsa Jawa atau memberi nama kepada orang lain. Ada lagi, apabila ada orang desa yang menyimpang tingkahnya atau bertindak kurang tepat dengan jabatannya, maka Sultan berpihak kepada tuan Kusni. Tuan Kusni berhak menanggukkan jabatan kepala tadi, lalu wajib memberi tahu kepada pemerintah supaya penyidik segera menyelesaikan masalah yang ada di desa serta menghukum orang yang bersalah tadi. Ada lagi bab pemilihan kepala desa yang baru, pengganti orang jahat tadi, jalankanlah sesuai aturan. Tuan Kusni tidak boleh meminjamkan atau menggelapkan tanah desa, menjadi sedikit atau lebih banyak kepada orang yang tak berhak. Apabila tuan Kusni sudah sampai jatuh tempo wajib mengembalikan tanah di desa tadi.

Keempat surat tersebut kemudian dianulir saat ratifikasi tanah pasca perjanjian Klaten 1830. Pemerintah Hindia Belanda mengutus tiga orang komisaris yakni P. Merkus, J. L. Sevenhoven dan H.G. Nahuys untuk menata ulang wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Pada tanggal 24 Juni 1831, desa-desa di wilayah Serang dan Ampel, *Nagaraagung* Yogyakarta yang disebutkan dalam keempat di atas kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Surakarta. Hal ini ditegaskan dengan pernyataan Sunan Paku Buwana VII bahwa ia sudah menerima kebijakan pemerintah Hindia Belanda melalui Sevenhoven, tentang perpindahan kekuasaan dari Yogyakarta ke Surakarta.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Nukilan naskah SD memuat empat surat terkait perjanjian penyewaan tanah di wilayah nagaraagung Kraton Yogyakarta. Dalam nukilan naskah SD yang memuat surat-surat tersebut ditemukan banyak varian. Varian-varian tersebut dibagi ke dalam 7 kesalahan yang ditemukan, yaitu lakuna (6); adisi (2); hipercorect (18); transposisi (2); ditografi (1) dan ketidakkonsistenan penulisan (2). Edisi teks atas surat-surat dalam naskah SD ini menggunakan pertimbangan kontekstual dan linguistik.

Keempat surat perjanjian tersebut merupakan surat dari pemangku kebijakan keraton Yogyakarta, dalam hal ini adalah Sultan dan Patih, yang memberikan hak kuasa kepada pengusaha Eropa atas pengelolaan tanah dan desa di wilayah nagaraagung Yogyakarta secara khusus di kadipaten Ampel dan Serang. Pasca Perjanjian Klaten pada tanggal 23 September 1830, intervensi pemerintah Hindia Belanda dilakukan serentak di wilayah Yogyakarta dan Surakarta dengan melakukan ratifikasi tanah. Seluruh wilayah yang termuat dalam surat-surat tersebut, pada 24 Juni 1831 resmi menjadi wilayah Kasunanan Surakarta di bawah pemerintahan Sunan Paku Buwono VII.

B. Saran

Penelitian ini adalah langkah awal untuk melengkapi penataan ulang wilayah Nagara Agung dan Manca Nagara di Kraton surakarta dan Yogyakarta pasca perang diponegoro, penelitian ini membuka penelitian tanah yang baru seperti kadipaten mangkunagara dan pakubumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. (2013). *Pengetan Kagungan Dalem Siti Dhusun*. Surakarta: UNS .
- Bariied, S. B. (1994). *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Kemdikbud RI.
- Carey, P. (2011). *Kuasa Ramalan*. Jakarta: KPG.
- Djamaris, E. (2002). *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV. Manasco.
- Florida, N. K. (1993). *Javanese Literature in Surakarta Manuscripts: Introduction and manuscripts of the Karaton Surakarta*. Cornell US: Southeast Asia Program - Cornell University.
- Girardet, N. (1983). *Descriptive catalogue of the Javanese manuscripts and printed books in the main libraries of Surakarta and Yogyakarta*. Wiesbaden: Steiner.
- Houbent, V. (2002). *Keraton dan Kumpeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Jakarta: KITLV.
- Knight, G. R. (2015). *Trade and Empire in Early Nineteenth-Century Southeast Asia: Gillian Maclaine and his Business Network (Worlds of the East India Company)*. Woodbridge UK: Boydell Press.

- Lindsay, J., Soetanto, R. M., Feinstein, A. H., & Behrend, T. E. (1994). *Katalog induk naskah-naskah Nusantara. Jilid 2 : Kraton Yogyakarta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mujizah. (2014). *Menyingkap Sejarah Perbudakan dalam Manuskrip Indonesia: Surat Raja Tanette. Metasastra*.
- Poerwadarminta, W. (1935). *Baoesastra Djawa*. Batavia: J. B. WOLTERS' UITGEVERS = MAATSCHAPPAIJ N.V. GRONINGEN.
- Pudjiastuti, T. (2004). *Surat-Surat Sultan Banten Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Wacana*.
- Ramadhan, L. J. (2015). *Perjanjian Klaten 1830: Dampaknya Pada Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY.
- Rcklefs, M. (2002). *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi, 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Robson, S. (1994). *Prinsip-prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta: RUL.
- Roorda, T. (2002). *Serat Angger-Agger Jawi*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Soemantri, E. H. (1986). *Identifikasi Naskah*. Bandung: Fakultas Sastra UNPAD.
- Suryadi. (2007). Surat-Surat Sultan Buton, Dayyan Asraruddin dan Kaimuddin I. *Humaniora*, 284-301.
- Sutopo, H. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- T. E. Behrend, A. H. (1990). *Katalog induk naskah-naskah nusantara: Fakultas Sastra Universitas Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ulbe Bosma, J. A.-C. (2007). *Sugarlandia Revisited: Sugar and Colonialism in Asia and the Americas, 1800-1940*. New York: Independent Publishing.
- Weitzel, A. W. (1852). *De oorlog op Java van 1825 tot 1830: hoofdzakelijk bewerkt naar de nagelatene papieren van Z. Exc. den luitenant-generaal baron Merkus de Kock*. Michigan: University of Michigan Library.

Lampiran – Edisi Teks

[7]

Pèngêt, iki layang manira piagêm Kangjêng Radèn Adipati Danurêja kagadhuha marang saudara tuwan Johanis Agustinis Dhêsênje ing Ampèl. Marmane saudara tuwan Johanis Agustinis Dhêsênje anggadhuh layang manira piagêm. Dene ing mangko amajêgi kagungan dalêm bumi desa, iki arane desane:

Ing Pênthongan sajung, Banaran sajung, Wanasêgara sajung sakikil, dadi cacah bumi kapatêngah jung, iku padha tanah sawetaning gunung Mêrbabu¹³ kabèh. Dene lawase gone

amajègi iku mau wolung taun dadi nèmbêlas pasokan, wiwit¹⁴ ing garêbêg Mulud taun Je iki 1758. Dene tempone besuk pajêge bakdane garêbêg Pasa taun Jimawal 1765 disangga pajêge jung pitung puluh reyal, reyalan nélung puluh uwang, sareyale ing dalêm sêtaun. Gunggung pajêg bumi kapat têngah jung mau, ing dalêm satêngah taun 122 ½ reyal, iku diladèkna ping pindho sêtaun. Lan manira wus angakoni anampani kèncèngan dhuwit akèhe¹⁵ 180 reyal sumurup pajêge ing dalêm patang taun.

Dene jangji manira marang saudara tuwan Dhèsênje ing sabên-sabên mangsa angladèkake pajêg satêngah taun, dicowoka sêprapatane pajêg sêtaun, manira wis trima ing sabên mangsa anampani pajêg 61 ¼ reyal. Dene sahe dhuwit kèncèngan pajêg patang atus iku mau, sak tempone jangji ing dalêm wolung taun sarta mati sabarang takêrturun¹⁶.

Karo dene manèh saudara tuwan Dhèsênje manira gadhuhi kagungan dalêm bumi mutihan ing Pantaran sajung iku, ora kêna saudara tuwan Dhèsênje mau yèn angèmpèka gawene anjabane gawene dhewe rêsèrik pasareyan sarta andandani kang padha rusak anyupriha bécike.

Dene samangsane ing sasi garêbêg Mulud, Bèkèle asaosa lumêbu ményang nagara sarta angladèkna apa kang dadi sêsanggane bumi mutihan. Dene pépacak manira marang saudara tuwan Dhèsênje, ora kêna yèn agawea rusaking desa, anganiaya wong desa, utawa angèthèrèna pajêg.

Wêwalêr manira manèh marang saudara tuwan Dhèsênje, aja nganti kandhég kampiran wong ala lan aja angrojongi wong kang panggaweane ala sapanunggalane kabèh, ba-[hal8] lik anyupriha gémah raharjaning. Kumisesa kono iku sarupaning wong bumi desa, bèbèkèle bumi patang jung sakikil kalêbu gadhuhane iku mau kabèh padha mituruta apa ing saparentahe saudara tuwan Dhèsênje, iku poma mituhua apa saunine layang manira piagêm iki.

Katulis Ngayogyakarta, Akad tanggal kaping 26 sasi Sura taun 1748¹⁷.

Kalih dene Kangjêng tuwan Residhèn, mênggah siti pamêthakan pun Pantaran sajung punika sampun ngantos kalèbêtakèn wontèn nawalanipun¹⁸ tuwan Dhèsênje, sabab badhe dados gadhuhipun Mas Pangulu, ingkang mawi siti punika botèn kapaosan amung kagadhuhi mawon lan malih mênggah padamêlanipun ing parèdèn inggih tumindaka kados limrahipun ing kathah.

[9] halaman kosong

[10]

Pèngêt, layangingsun piagêm Kangjêng Sultan Sêpuh Hamêngkubuwana¹⁹ Senapati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Kalipatulah Kaping 2 ing Ngayogyakarta Hadiningrat, ingsun gadhuhakèn marang tuwan Giliyan Maklin. Marmane ingsun gadhuhi layangingsun piagêm, dene amajègi kagunganingsun bumi desa ing Dhadhakan karya sajung, lan ing Banaran karya sajung, ing Sêmbung karya sajung, Sampêt karya sajung, gunggung kabèh

14 kawit*

15 kèhe*

16 takrêturun* dan di tempat lainnya

17 Konversi penanggalan Masehi menjadi 8 November 1820.

18 nuwalanipun*

19 Hamangkubuwana*# dan di tempat lainnya

patang jung. Iku kabèh padha kaprènah sawetaning gunung Mérbabu²⁰ sarta gone amajègi wus têrang karo Kanjêng Guprémèn Nedrèlan.

Ana dene lawase gone amajègi iku têtulas taun dadi 26 pasokan wiwit ing sasi Pebruari ping 1 taun 1827 tempone ing sasi Januari ping 31 taun angka 1840. Dèn pajègi sewu rupiyah ing dalêm sêtaune métu têtengahan ping pindho sêtahun, bakdaning garèbèg Pasa angladèkna kagunganingsun pajèg limangatus rupiyah. Ing bakdaning garèbèg Mulud limangatus rupiyah, iku mati ing sabarang takêrturun.

Kang saupama tuwan Giliyan mau gawe rusaking desa, anganiaya ing wonge atawa angèthèrke kagunganingsun pajèg, sênajan durung tutug ing têtulas taun, amèsthi kagunganingsun bumi desa kang wus kasêbut ing ngarêp mau ing sun jabêl.

Dene ing mêngko tuwan Maklin atampa bumi sawah irêngan, besuk ing tempone iya angaturèna kagunganingsun bumi desa ing irêngan konjuk ing sampeyaningsun, dene yèn ana tandurane kang durung tuwa kayata Kopi, Pari, sapanunggalane kang durung kaundhuh, misih jênêng kuningan, iya ing sun sêrantèkake sarèsike pangundhuhe tuwan Maklin.

Karo dene manèh tuwan Maklin ora wênang amocot atawa anggantung kalungguhane Dêmang, Bèkèl lan sapanunggalane lan anandur wong saliyané atas Panjênênganingsun kang kalungan panguwasa. Lan manèh pépacakingsun marang tuwan Maklin, aja kandèg kampir lan ngrojongi wong ala alaku durjana lan angadègake ngabalaan, balik nyupriha tèntrêm harjaning bumi desa ing kono. Wusana tuwan Maklin ora kêna anggliyêrake bumi desa kang di-[hal 11] pajègi mau, yèn ora²¹ têrang lan panjênênganingsun.

Pacuan-pacuan²² sakèhe kawulaningsun padha sira angèstokèna saunine layangingsun piagêm kang ing sun gadhuhakèn marang tuwan Giliyan Maklin, taha yèn tan angèstokèna atanapi yèn amaidoa. Kalaksanaa²³ marang sakèhe para nayakaningsun ana ing alun-aluningsun ing Ngayogyakarta Hadiningrat sarta konjuk panjênênganingsun. Titi.

[12][13] halaman kosong

[14]

Punika ing kang sêrat prajangjian, Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan Sêpuh Hamêngkubuwana Senapati Ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Kalipatullah Kaping Kalih kang kèdhaton nagara ing Ngayogyakarta Hadiningrat akalihan tuwan Johanis Agustinis Dhèsênje ing Surakarta.

Bab 1

Ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan andhawuhakèn pangandika yèn amajègakèn dhumatêng tuwan Dhèsênje siti dhusun ing Gagatan ing sawêtawis, wondening mênggah namaning dhusun ing satunggal-tunggalipun ing ngandhap punika pratelanipun.

20 Mrèbabu*

21 orang*

22 pacuwan*

23 Kawlaksanaa*

Ing Karang Gedhe, ing Kalimas Kulon, ing Sili Kidul, ing Pawing Wetan, ing Pawing Kulon, ing Kumusu, ing Ragum, ing Kêdhung Pring, ing Pasarean, ing Tari, ing Karangasêm, ing Balimbangan sêdaya kalihwêlas jung.

Ing Kebonan, ing Sêling lor, ing Sêndhang, ing Jatisari, ing Ngijo, ing Lêmbadhatan, ing Kêmusu, ing Kêdhung Lo, ing Krutukan, ing Karang Gênhêng, ing Kalongan, ing Dhuwaran, ing Kutukan Kayêng sêdaya karya pitulas jung.

Ing Pulutan, ing Gêdhangan, ing Kêmlaka Kêrêp, ing Pringapus sêdaya sêkawan²⁴jung. Ing Toyan, ing Karang Jati, ing Gagatan Kulon, ing Gagatan Etan, kabèh wolung jung. Ing Talepat, ing Ngawèn, ing Karang Plasa, ing Karang Toya, ing Pidikan kabèh patang jung. Ing Tawang Sari, ing Ngambat, ing Balumbang Kèndêl, ing Gligang, ing Karang Lo, ing Kalangan, ing Sange Kaponan, ing Karanglo Pancas, ing Jatèn pancas, ing Ngawang Sari sêdaya karya tigawêlas jung. Ing Kaworan, ing Bangêr, ing Bala Kidul, ing Kêmusu sarta ing Bala Lor sêdaya karya nêm jung. Utawi sêdaya sêwidak sêkawan jung siti pasabinan anjawi siti patêgilan utawi wananipun punika botên tumut kaetang. Wondening tuwan Dhêsênje inggih angakèni yèn amajègi siti dhusun kang sampun sami kasêbut ing ngajêng wau sêdaya.

Bab 2

Mênggah lamine gènipun amajègi wau gangsal wêlas taun, wiwit ing sapisan sasi Sèp-[hal 15]tèmbêr taun sèwu wolungatus pitulikur, yèn temponipun pèjah ing sasi Agustus taun sèwu wolungatus sêkawan dasa kalih.

Bab 3

Wondening pas bayaring pajêg kados ing ngandhap punika pratelanipun. Sarêng wiwitipun amajègi ing dalêm gangsal taun kasanggi pajêg sèwu ringgit. Ing dalêm sêtaunipun mêtal têtêngahan ing garêbêg Siyam sapalih, ing garêbêg Mulud sapalih. Gangsal taunipun malih kasanggi pajêg tigangewu ringgit. Ing dalêm sêtaun inggih mêtal tatêngahan kados kasêbut wau.

Sakantunipun ingkang gangsal taun kang kasanggi pajêg tigangewu ringgit, ing dalêm sêtaun inggih mêtal tatêngahan ing garêbêg Siyam sèwu gangsalatus, ing garêbêg Mulud sèwu gangsalatus. Ananging mênggah rampungan pajêg punika mila kadamêl kados ingkang kasêbut ing ngajêng wau. Sawab kawuninganipun nagara salamènipun dumugi ing mangke pajêgipun inggih amung sèwu ringgit ing dalêm sêtaun. Saupami benjing nagara manggih katêranganipun yèn pajêgipun mila kang wau langkung sèwu ringgit, tuwan Dhêsênje inggih badhe bayar langkung kadosta upaminipun pajêg sèwu kalihatus ringgit ing dalêm sêtaun kados ingkang gangsal taun wiwitan pajêge sèwu ringgit.

Kang dalêm sêtaun mau tuwan Dhêsênje inggih badhe bayar sèwu kalihatus ringgit kang gangsal taunipun malih pajêg kalihèwu. Kang dalêm sêtaun badhe bayar kalihèwu sêkawanatus

24 kawan* dan di tempat lainnya

ringgit. Inggang pungkasan gangsal taun, pajêg tigangèwu ringgit. Ing dalêm sêtaun badhe bayar tigangèwu nêmatu ringgit, sawab ing mangke pakèwéd anggènipun²⁵ amriksani.

Bab 4

Tuwan Dhèsênje anyanggêmi ing sumangsanipun sêrat prajangjian punika sampun kaparingakên²⁶. Tumuntên anyaosî kèncèngan kathahipun sèwu ringgit, dhumatêng ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan sumêrêp²⁷ pajêg ing wêkasanipun tampa.

[hal 16]

Bab 5

Tuwan Dhèsênje aprajangji badhe botên nindakakên ing sakajêngipun, ingatasipun tiyang alit ing siti dhusun wau. Kang sarta tuwan Dhèsênje aprajangji mênggahing bayaran ingkang dhatêng tiyang alit sumêrêp gènipun nyanggi pèdamêlanipun punika badhe karuhan ing pambayaranipun ingkang kaliyan sami narimahipun. Wondeningbilih tuwan Dhèsênje botên anêtêpi ing prajangjianipun, adamêl risaking siti dhusun utawi angèthèrakên ing sêsanggènipun uwang pajêg, mangka sampun têtela têtêp ing kalêpatanipun, punika ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan wênang andhadhala siti dhusun saking tuwan Dhèsênje sanajan dèrèng dumugi ing mangsanipun tempo.

Bab 6

Tuwan Dhèsênje aprajangji badhe anyuprih gêmah harjanipun ing tanêm tuwuh kang nami Pantun supados sampun kantos kékirangan uwos. Ananging tuwan Dhèsênje wênang ananêmana barang tanêm tuwuh pundi kang dipun-galih dados prayogi.

Bab 7

Tuwan Dhèsênje anampèni siti dhusun irêngan, benjing yèn sampun dumugi ing mangsanipun tempo inggih amangsulêna irêngan dhumatêng ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan. Ananging yèn mangsa amangsulakên, mangka téksih wonten tanêmanipun palawija kadosta Pantun, Jagung, Kêtela sarta sêsaming palawija, punika bagi kalih ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan kagungan sêpalih, tuwan Dhèsênje sêpalih. Saupami wonten tanêm tuwuh kang sanès palawija ingkang botên angémungakên sêtaun kemawon²⁸ kadosta Kopi, Têbu, sarta sêsaminipun tanêm tuwuh punika tuwan Dhèsênje botên ndhèrèk anggadhahi têtêp dados kagunganipun ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan.

25 ènggènipun*

26 kaparèngkên*

27 sumrêrêp* dan ditempat lainnya

28 kimawon*

Bab 8

Tuwan Dhèsênje botên kenging ing sêsangèn takêrturun sapanunggalipun, kajawi amung pèdamêlan bab andadosi karêtég, margi-margi, sapanunggilanipun ingkang watês pèdamêlani-
[hal 17] pun ing nagara punika têksih kasanggia.

Bab 9

Tuwan Dhèsênje aprajangji badhe rumêksa supados siti dhusun ingkang sampun dipunpajêgi wau sampun ngantos²⁹ wontên lampah ingkang botên prayogi utawi tiyang ngadégakên botohan punapa dene ngrojongi tiyang dursila sapanunggilipun. Wondening ingkang Sinuhun Kangjêng Sultan aprajangji badhe ambiyantuni dhatêng tuwan Dhèsênje gènira anyuprih tata gêmah tèntrêming³⁰ siti dhusun.

Bab 10

Tuwan Dhèsênje aprajangji botên anindakakên panguwasa wontên siti dhusun ingkang dipunpajêgi wau, utawi amocot punapa dene ananêm kêpala dhusun sarta aprajangji botên badhe amêndhêt utawi angangge nama kados tiyang Jawi punapa dene anyukanana nama dhatêng tiyang sanès.

Wondening bilih wontên kêpala dhusun awon ing lampahipun utawi adamêl kalêpatan, tuwan Dhèsênje amung kenging anggantung ing kalênggahanipun. Ananging enggala angaturana wuninga dhatêng Kangjêng Radèn Adipati supados kapariksaa prakawisipun dhatêng Kangjêng Radèn Adipati punika ingkang badhe angrampungni utawi angukum dhatêng tiyang ingkang adamêl kalêpatan wau. wontên³¹ dene bab pananêming kêpala dhusun punika atas Kangjêng Radèn Adipati darbeni pangucap.

Bab 11

Tuwan Dhèsênje aprajangji badhe amanut anglampahi sakathahe parentah bab pamajêgipun siti dhusun, dados kaparentah kang sampun tumindak utawi ingkang badhe katindakakên ing wingking.

Karampungan tanggal ping 16, ing sasi Agustus taun 1827

Inkang punika Kangjêng tuwan Rèsidhèn, mênggah wana kajêng Jatos pun Gagatan lulus [hal 18] kados parentahing Guprêmèn. Ménawi kapêndhêt kadamêl Loji utawi karêtég-karêtég sapanunggilanipun. Ladosa adat ingkang sampun kêlampahan lan padamêlanipun ing prèdèn tumindaka kados limrahipun ing kathah.

29 kantos*

30 trêngtrêming

31 èntèn*

[19]halaman kosong

[20]

Pènget, iki nawalaningsun piagêm Kangjêng Sultan Hamêngkubuwana ingkang Kaping V Senapati Ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidina Panatagama Kalipatulah, ingkang ngrénggani nagara ing Ngayogyakarta Hadiningrat sun gadhuhakên marang tuwan Wiliyan Kusni. Marmane tuwan Wiliyan Kusni kagadhuhan nawalaningsun.

Dene ing mêngko amajêgi kagunganingsun bumi desa tanah ing Sima 26 jung sarta gone amajêgi uwis têrang ing Kangjêng tuwan Guprêmèn Nèdrêlan. Dene lawase gone amajêgi iku 18 taun, dadi têlungpuluh nêm pasokan. Wiwit tanggal ping 1 sasi Januari taun 1829 tempone tanggal ping 31 sasi Dhesembêr taun 1846, dipajêgi 624 rupiyah ing dalêm sêtaun. Sabakdane garêbêg Pasa 312 rupiyah, sabakdane garêbêg Mulud 312 rupiyah. Iku wus mati barang takêrturun atawa sabarang wêtune ing bumi kang dudu pajêg. Ananging misih kêna bubutane, dandan-dandan karêtêg, dédalan, lurung sapanunggalane. Apa kang dadi pamundhuting parentah.

Ana dene tuwan Kusni mau atampaa kagunganingsun bumi desa ing Sima irêngan, besuk yèn wis tempone tuwan Kusni iya ambalekna kagunganingsun bumi mau iya irêngan. Yèn saupama wis tempone bumi desa mau misih ana tandurane, lulusa mênyang tuwan Kusni, bumine iya lulusa dadi kagunganingsun manèh. Lan Tuwan Kusni yèn ana karêpe, bab wit-witan³² Kahwa atawa wit-witan liyane, kang misih ana wohe, mungguh wohe mau iya lulusa mênyang tuwan Kusni, ana dene wite iya têtêpa dadi kagunganingsun, ora kêna tuwan Kusni angrêngkuha wit-witan kang wus diunduh wohe.

Wondening wêwalêringsun marang tuwan Kusni ora kênaa yèn anganiayaa marang wong cilik³³. Yèn jaluk bahu-sukune wong cilik, ambayar samurcate sarta kang dadi panrimane wong desa mau. Ora kêna Kusni agawe rusaking wong, miwah rusaking desa atawa angèthèrake kagunganingsun pajêg. Sênajan durung tutug ing jangji wolulas taun, amêsthi kagunganingsun bumi desa ing Sima kang kasêbut ing ngarêp mau iya bakal sun pundhut.

Tuwan Kusni anjagaa ing kagunganingsun bumi desa ing Sima, aja agawe rusuh[21] sajroning desa kono mau, aja nganti ana wong botohan, aja ana wong ala aluputan atawa wong liyane rêrusuhan apa manèh wong ala nganti katulungan marang desa bumi kono atawa wong desa aja nganti wani-wani kanggonan wong ala.

Ana dene yèn ana abote olêhe bakal nyirnaake wong ala, supriha gêmah harjaning bumi desa mau, iya ing sun bakal amaringi pitulung lan manèh tuwan Kusni aja wani-wani anganggo panguwasaning parentah nagara ana ing tanah kono atawa amocota kèpala desa. Apa manèh anganggoa kalungguhan, kaya kawulaningsun bangsa Jawa atawa aweha aran marang ing wong liyane. Ana dene saupama ana wong desa kang ngalap trape, pênggaweane ora pantês angênggoni ing kalungguhane, ing sun amênangakên marang tuwan Kusni. Gantunga kalungguhane marang ing kèpala iku mau, ananging anyaosa uninga ing panjênênganingsun supaya ing sun bisa ametokake Gandhèk titi priksa, mungguh prakarane ing desa bisaa rampung sarta angukumi marang wong kang luput iku mau. Ana dene bab panggawene kèpala desa anyar, gégêntine wong kang ala iku mau kasumanggakna apa kang dadi karsaningsun.

32 wiwitan*# dan ditempat lainnya

33 calik*#

Tuwan Kusni ora kêna yèn amajêgêna atawa angliyêrna bumi desa, dadia sêthithik atawa kathah marang ing wong liyane mêsthi ora kêna. Ana dene tuwan Kusni yèn nêja anglakoni kang mêngkono iku mau, ora kêna ora iya matura dhimin marang ing Panjênênganingsun iya anglilani ananging kauningana marang ing Kangjêng Guprêmèn.

Lan manèh yèn wis têkan ing tempone tuwan Kusni olehe amajêgi kagunganingsun bumi desa ing Sima iku mau, iya ingsun lilani³⁴ amajêgi manèh marang ing kagunganingsun bumi desa iku mau ananging yèn kalayan parêngingsun ana dene ing samangsane besuk tumêka ing tempone bumi desa ing Sima mau, mulih marang ing Panjênênganingsun iku amêsthi ora anganggo ongkos.

34 lalani*#